

Strategi Pengembangan Wilayah Nodal Pertanian Berdasarkan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Ciamis

Strategy for Developing Agricultural Nodal Areas based on Regional Classification in Ciamis District

Dina Marcelina*, Wasrob Nasruddin

Program Studi Agribisnis Hortikultura, Jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

*Korespondensi penulis, Email: dinamarcelina04@gmail.com

Diterima: Oktober 2021

Disetujui terbit: Desember 2021

ABSTRACT

A unit in the region must have different characteristics of involvement in several aspects to meet the balance of the region, one of which is the agricultural aspect. Agriculture is an important aspect in the governance of an area because it involves meeting the needs of human life as residents of the area. Sub-districts in Ciamis Regency have different characteristics of involvement in agricultural aspects. This difference lies in the role of each region, namely as a marketing center and a center for agricultural production. The center must be known for the creation of optimal and efficient regional potential development. This study aimed to determine the potential for regional development through the role of the sub-district area using hierarchical analysis. The research method used was secondary data collection techniques sourced from BPS (Central Bureau of Statistics) Ciamis Regency. The results of this regional hierarchical analysis provided data in the form of grouping sub-districts in Ciamis Regency based on the number of infrastructure facilities and population from the big-small ranking system. Region order. This will be the material for determining the location of the center of the role of the nodal region. The result stated that Ciamis District was designated as a marketing center for agricultural products that covers the medium and low hierarchical sub-districts. The regional development strategy was then carried out by strengthening all elements of the agribusiness subsystem.

Keywords: agriculture, area development, nodal region

ABSTRAK

Suatu kesatuan dalam wilayah pasti memiliki karakteristik keterlibatan yang berbeda dalam beberapa aspek demi menyongsong keseimbangan wilayahnya, salah satunya adalah aspek pertanian. Pertanian merupakan aspek penting dalam tata kelola suatu wilayah karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai penghuni wilayah tersebut. Kecamatan di Kabupaten Ciamis memiliki karakteristik keterlibatan pada aspek pertanian yang berbeda-beda. Perbedaan ini terletak pada peran masing-masing wilayah tersebut yaitu sebagai pusat pemasaran dan pusat produksi hasil pertanian. Pusat tersebut haruslah diketahui demi terciptanya pengembangan potensi wilayah secara optimal dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan wilayah melalui peran wilayah kecamatan menggunakan analisis hierarki. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Ciamis. Hasil dari analisis hierarki wilayah ini memberikan data berupa pengelompokan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis berdasarkan jumlah sarana prasarana dan jumlah penduduk dari dengan sistem pemeringkatan besar-kecil. Urutan wilayah tersebut akan menjadi bahan penentuan titik lokasi pusat peran wilayah nodal itu berada. Hasilnya akhir menyatakan bahwa Kecamatan Ciamis ditetapkan sebagai pusat pemasaran produk hasil pertanian yang menaungi wilayah kecamatan hierarki sedang dan rendah. Strategi pengembangan wilayah kemudian dilakukan dengan memperkuat seluruh elemen subsistem agribisnis.

Kata kunci: pengembangan wilayah, pertanian, wilayah nodal

PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis mempunyai luas lahan sekitar 143.200 Ha dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi kedalam 27 kecamatan, 258 desa/kelurahan, dan jumlah penduduk sekitar 1.418.301 jiwa. Banyak penduduk yang melakukan migrasi ke kota untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan hidup. Pergerakan penduduk ke pusat kota salah satunya diakibatkan oleh adanya daya tarik yang besar di pusat kota seperti ketersediaan fasilitas pelayanan yang lengkap (Massiki 2005). Fasilitas pelayanan ini sifatnya sangat aktual karena dapat menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Kualitas Lingkungan permukiman akan ditentukan oleh pemenuhan suatu kebutuhan yang secara otomatis diharapkan akan berdampak peningkatan pada taraf kehidupan penghuninya (Massiki 2005). Pertumbuhan suatu pusat/kota ditunjang oleh hinterland yang baik. Daerah hinterland sendiri merupakan suatu wilayah yang memberikan sumbangan pangan berupa bahan baku maupun tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh pihak industri maupun non industri di perkotaan. Kabupaten Ciamis tentunya memiliki wilayah hinterland yang tersebar di beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Ciamis ini

memiliki kontribusi yang berbeda pada beberapa aspek, salah satunya adalah pertanian. Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia, artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir setengah dari perekonomian (Sjamsir 2017). Pertanian memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga paradigma pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis dititikberatkan pada keselarasan pengembangan pertanian dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya lokal. Klasifikasi wilayah nodal ini akan dilakukan melalui pendekatan produksi pertanian.

Karakteristik utama wilayah yang masuk dalam kategori wilayah nodal adalah adanya kecenderungan dari aktivitas wilayah untuk terpusat pada satu kegiatan yang dominan (nodus) yang ada di wilayah tersebut (Muljarjadi, 2016). Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu sel hidup yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau permukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*periphery/hinterland*) yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Hierarki wilayah ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanannya. Kapasitas pelayanan suatu wilayah dicerminkan

pula oleh magnitude (besaran) aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang ada di suatu wilayah. Wilayah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas umum, industri dan jumlah penduduk dengan kualitas dan kuantitas relatif paling lengkap dibandingkan dengan wilayah lain akan menjadi pusat atau mempunyai hierarki wilayah yang lebih tinggi. Sebaliknya jika suatu wilayah mempunyai jumlah dan fasilitas umum, industri serta jumlah penduduk dengan kualitas dan kuantitas paling rendah merupakan wilayah hinterland dari unit wilayah lain secara administratif. Klasifikasi wilayah nodal ini akan dilakukan pada 2 kategori yaitu secara administratif, dan pewilayahan daerah pusat hinterland berdasarkan pendekatan wilayah pada produksi pertaniannya.

Pendekatan wilayah ini akan memberikan jawaban mengenai informasi daerah yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan serta jenis komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Pusat pertumbuhan yang telah terdeteksi ini akan membuat proses pengembangan dapat dilakukan lebih efisien dan optimum. Analisis wilayah ini memiliki tujuan sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencari wilayah nodal secara administratif dan pusat wilayah hinterland. Penetapan wilayah

nodal secara administratif ini dilakukan karena wilayah ini memiliki peran sebagai tujuan utama pemasaran produk pertanian dari wilayah hinterland, sedangkan pusat pertanian serta jenis komoditi unggulan wilayah hinterland dicari dalam rangka sebagai bentuk upaya pengembangan wilayah secara optimal melalui masing-masing subsistem agribisnis.

METODE

Jenis penelitian merupakan kualitatif dengan memilih Kabupaten Ciamis sebagai bahan analisis berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki. Penelitian ini dimulai pada tanggal 7 Maret 2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2019 yang bersumber dari publikasi BPS Kabupaten Ciamis (2020). Metode pengumpulan data diawali dengan penyajian variabel data jumlah penduduk dan sarana prasarana di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Ciamis, kemudian jumlah masing-masing variabel menjadi tolak ukur dalam pengurutan wilayah dengan nilai jumlah tertinggi ke nilai terendah barulah komponen wilayah nodal tersebut dapat ditetapkan. Analisis hubungan fungsional antara wilayah pusat kota dengan wilayah hinterland juga dilakukan dengan tanpa melewati rencana pengembangan

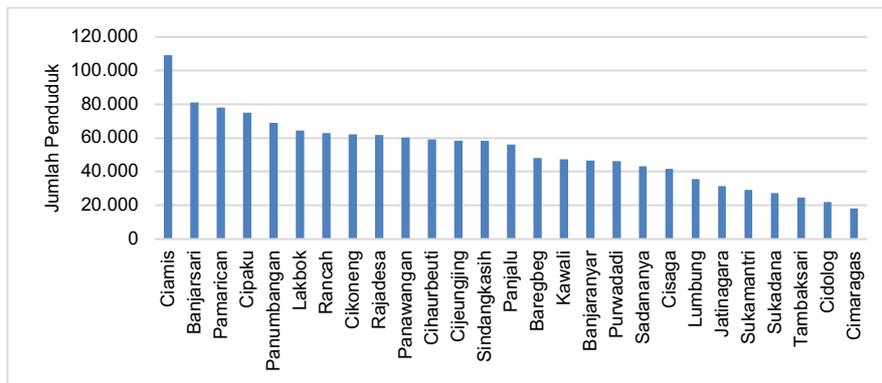
untuk wilayah tersebut melalui penguatan subsistem agribisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

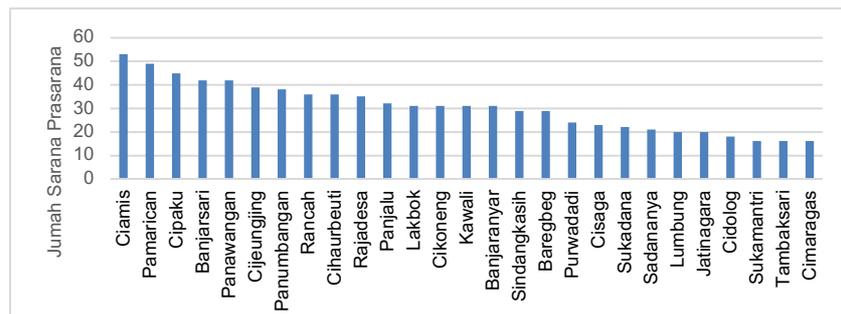
Menetapkan Hierarki Wilayah

Kota merupakan pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, dan pusat permukiman. Terdapat transaksi antar berbagai kegiatan/sector yang bernilai ekonomi, perlu juga tambahan kriteria bahwa konsentrasi itu berfungsi melayani daerah belakangnya (*hinterland*).

Berbagai fasilitas yang ada seperti tempat perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya; tidak hanya melayani/dimanfaatkan oleh penduduk kota itu saja, tetapi juga melayani masyarakat yang datang dari luar kota yang sering disebut sebagai daerah belakangnya. Langkah penentuan hierarki wilayah adalah menyusun urutan wilayah kecamatan berdasarkan angka tertinggi pada jumlah penduduk dan jumlah sarana prasarana. Berikut ini disajikan grafik urutan wilayah menurut jumlah penduduk pada tahun 2019.



Gambar 1 Data jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2019



Gambar 2 Data jumlah sarana prasarana Kabupaten Ciamis tahun 2019

Data sarana prasarana yang digunakan pada grafik tersebut meliputi sarana pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi), fasilitas kesehatan (rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, apotek), dan fasilitas perdagangan (pasar pemerintah daerah, pasar desa). Hasil urutan wilayah yang terdapat pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ciamis ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten pusat dari wilayah administratif serta pusat pemasaran produk hasil pertanian. Hal ini terjadi karena sinkronnya jumlah penduduk dengan jumlah fasilitas tertinggi. Wilayah kecamatan lainnya ditetapkan sebagai *hinterland*. Data wilayah *hinterland* tersebut akan dikelompokkan dengan tujuan untuk kepentingan penetapan wilayah pusat produksi pertanian, serta sebagai bahan perencanaan pengembangan wilayah. Suatu wilayah harus dapat dibagi (*partitioning*) atau dikelompokkan (*grouping*) ke dalam satu kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan lain.

Begitupun untuk konteks perwilayahan yang ada di Kabupaten Ciamis, diperlukan adanya suatu perencanaan guna mengembangkan struktur ruang kewilayahannya. Perencanaan merupakan usaha menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan 2005). Adapun kelompok wilayah *hinterland* ini adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Hierarki Tinggi

Kelompok hierarki tinggi merupakan wilayah yang memiliki karakteristik variable rata-rata jumlah penduduk dan jumlah fasilitas cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya, dan memiliki peran 95% sebagai konsumen atau tujuan pasar produk pertanian Wilayah yang termasuk kedalam kelompok ini merupakan wilayah *hinterland* semi kota karena rata-rata jumlah penduduk dan jumlah ketersediaan fasilitasnya cukup tinggi. Wilayah tersebut yaitu Kecamatan Pamarican Kecamatan Cipaku, Kecamatan Panawangan,

Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Rancah, Kecamatan Cihaurbeuti, dan Kecamatan Rajadesa. Pada kelompok wilayah ini terdapat pusat agropolitan cabai merah yang berada di Kecamatan Pamarican yang menerima supply produk dari kecamatan lain.

b. Kelompok Hierarki Sedang

Kelompok hierarki sedang merupakan wilayah yang memiliki karakteristik variable rata-rata jumlah penduduk dan jumlah fasilitas sedang. Sedang disini artinya dalam jumlah yang tidak masuk tinggi dan rendah. Wilayah yang termasuk kedalam kelompok ini memiliki peran 80% sebagai penyuplai produk hasil pertanian, namun belum bisa dikatakan sebagai pusat wilayah produksi sepenuhnya. Hal ini demikian karena beberapa kecamatan termasuk kedalam organisasi agropolitan dan memiliki peran sebagai penyuplai produk hasil pertanian ke wilayah pusat agropolitan, dan sebagian besar wilayah lainnya merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk dan fasilitas cukup tinggi sebagai karakteristiknya. Wilayah tersebut yaitu Kecamatan Panjalu, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan

Kawali, Kecamatan Banjaranyar, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Purwadadi, dan Kecamatan Cisaga.

c. Kelompok Hierarki Rendah

Kelompok hierarki rendah merupakan wilayah yang memiliki karakteristik variable rata-rata jumlah penduduk dan jumlah fasilitas yang rendah dibandingkan kelompok wilayah sebelumnya. Wilayah yang termasuk kedalam kelompok ini memiliki peran 90% sebagai penyuplai produk hasil pertanian, dan dapat ditetapkan sebagai pusat wilayah produksi pertanian., serta sebagian besar wilayah kecamatan termasuk kedalam organisasi agropolitan dengan peran sebagai penyuplai produk hasil pertanian ke pusat agropolitan. Wilayah-wilayah tersebut yaitu Kecamatan Sadananya, Kecamatan Jatiningara, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Sukamantri, dan Kecamatan Cimaragas.

Tabel 1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran, Kabupaten Ciamis Tahun 2016–2020 (%)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah Tangga	69,64	69,81	69,61	69,01	69,00
Konsumsi LNPRT	1,12	1,12	1,26	1,25	1,23
Konsumsi Pemerintah	9,74	9,40	9,10	8,80	8,76
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,36	26,73	24,67	24,20	21,92
Perubahan Inventori	2,97	2,74	2,66	2,49	1,31
Net Ekspor (Ekspor-Impor)	(9,82)	(9,80)	(7,29)	(5,74)	(2,22)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis Menurut Pengeluaran 2016–2020

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis

Dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2020 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis sebesar -0,14% dibandingkan tahun 2019. Tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2016 s.d 2019 tetap tumbuh positif diatas 5%, yakni sebesar 5,99% (2016); 5,21% (2017); 5,31% (2018); dan 5,38% (2019). Peningkatan/penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan/penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan/penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau pengeluaran. Sisi produksi mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 terjadi pada kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh di atas 32%. Sisi permintaan akhir atau pengeluaran, PDRB Kabupaten Ciamis didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang

menyumbang 69% dari total PDRB. Berikut disajikan tabel distribusi PDRB Kabupaten Ciamis tahun 2016–2020. Kabupaten Ciamis memiliki dominan hasil perekonomian dari pertanian, sebagian kebutuhan domestiknya masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah/luar kabupaten atau bahkan luar negeri (impor). Hal ini dapat dilihat dari nilai Net Ekspor (Ekspor–Impor) yang bernilai negatif, pada kisaran 2,22 hingga 9,82%. Artinya, impor lebih besar dari pada ekspor. Seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Ciamis sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ciamis maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola

konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan mengalami perubahan dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah akan terus dipengaruhi oleh perilaku para konsumen akhir yang memiliki beragam tujuan. Rata-rata konsumsi per kapita per tahun menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Ciamis meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas) terutama pada konsumsi makanan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap kebutuhan produk pertanian sebagai bahan makanan akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk pada setiap tahun yang juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Maka dari itu, seiring bertambahnya waktu semakin banyak jumlah jiwa yang harus memenuhi prioritas kebutuhan primernya.

Analisis Hubungan Fungsional Desa dan Kota di Kabupaten Ciamis

Wilayah nodal merupakan wilayah yang membentuk sebuah keterikatan fungsional antar wilayah termasuk kota dan desa. Analisis fungsional ini terjadi ketika suatu wilayah memiliki hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Adapun hubungan fungsional tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Analisis hubungan fungsional desa dan kota industri

No	Desa	Kota Industri
1	Penyuplai Bahan Mentah (Komoditas pertanian, dll)	Penyuplai produk hasil industri
2	Tenaga kerja	Penyedia Lapangan Kerja
3	Melakukan budidaya pertanian sampai level akhir panen	Pasar konsumen
4	Penerima fasilitas keuangan seperti Perbankan, koperasi, dll	Pusat Perbankan, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya
5	Penerima kebutuhan jasa pendukung pertanian	Penyedia jasa pendukung pertanian
6	Pusat produksi pertanian	Pusat Perdagangan dan Transportasi Pertanian

Rencana Pengembangan Wilayah

1. Subsistem agroinput

Pengembangan wilayah dalam pada subsistem ini berfokus dalam memaksimalkan kebutuhan sarana produksi pada daerah hinterland demi mendapatkan produk yang lebih berkualitas dan bernilai jual lebih tinggi. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Sarana prasarana agroinput perlu ditingkatkan meliputi: Kebutuhan pupuk yang telah disubsidikan oleh pemerintah agar mampu dikelola dan dibagikan pada petani dengan tepat sasaran dan petani mendapatkan hak yang memang seharusnya mereka dapatkan,
- b) Pemberian alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan keadaan nyata lahan petani di lapangan. Ada beberapa kasus di beberapa wilayah

bahwasannya pemerintah memang telah memberikan subsidi alat dan mesin pertanian, tapi alat dan mesin pertanian tersebut tidak cocok dengan keadaan lahan petani.

- c) Perlu adanya penyuluhan atas inovasi pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida nabati untuk meminimalisir pencemaran lingkungan akibat pestisida kimia.

2. Subsistem *agro-production*

Agro production erat hubungannya dengan daerah hinterland sebagai pelaku utama penyedia bahan baku bagi calon industri di pusat kota. Untuk itu, agar produksi yang dihasilkan dapat lebih bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi teknik berproduksi harus selalu dengan SOP yang benar.

3. Subsistem agroindustri

Industri yang pusatnya berada di wilayah kota harus mampu memperlancar proses berjalannya produk dari desa menuju kota misalnya menyediakan sarana transportasi, jalan, dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, bagi daerah hinterland perlu adanya penyuluhan inovasi pengolahan hasil untuk meminimalisir pelebaran kerugian jika nantinya ada satu waktu dimana harga produk segar sedang tidak bersahabat akibat permainan pasar sehingga kita dapat memiliki pendapatan lain yang mampu menutupi kekurangan pada produk jual utama.

4. Subsistem *agromarketing*

- a) Penyediaan fasilitas pertanian penting (terminal agribisnis, sub terminal agribisnis, outlet agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil, dll) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
- b) Upaya pengurangan rantai pasok terlalu panjang
- c) Memperluas wilayah pemasaran produk baik lokal maupun pasar ekspor

5. Subsistem *agro-supporting*

- a) Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan. Pengembangan sistem dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian bagi wilayah pusat kota.
- b) Pengembangan serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian
- c) Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan wilayah pertanian seperti perlunya peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan terhadap budidaya tanaman hortikultura. Hal ini dilakukan untuk mengontrol penggunaan lahan yang ada atau mencegah terjadinya konversi lahan yang berkepanjangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis klasifikasi wilayah nodal ini menetapkan Kecamatan Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten dan pusat wilayah administratif dan pusat pemasaran produk pertanian. Wilayah lain selain Kecamatan Ciamis ditetapkan sebagai wilayah hinterland. Wilayah-wilayah ini kemudian

dikelompokkan berdasarkan 3 hierarki yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan tersebut menetapkan pusat produksi pertanian ada di kelompok hierarki rendah yaitu di Kecamatan Sadananya, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Sukamantri, dan Kecamatan Cimaragas. yang ada pada kelompok 1 ditetapkan sebagai pusat dalam wilayah hinterland. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif, kecuali pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Namun seiring berjalannya waktu manusia sudah mulai bisa beradaptasi pada kebiasaan baru pasca pandemi, sehingga perkembangan ekonomi perlahan mulai membaik sejalan dengan penambahan jumlah penduduk yang juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak permintaan terhadap produk hasil pertanian sebagai bahan makanan utama. Strategi Pengembangan Wilayah kemudian dilakukan dengan memperkuat masing-masing subsistem agribisnis.

Saran

Pengembangan potensi wilayah akan sukses dilakukan apabila semua pihak dapat terlibat secara aktif yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para masyarakatnya. Pihak-pihak ini tidak bisa bekerja secara individual melainkan butuh sinergi dari pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto MT, Chofyan I. 2019. Strategi pengembangan agribisnis cabai merah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis (*Development Strategy of Red Chilli Agribusiness in Agropolitan Area, Ciamis Regency*). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 16 (1): 9–16.
- Bambang E. 2012. *Ilmu Kewilayahan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Ciamis dalam Angka*. Ciamis: BPS Kabupaten Ciamis
- _____. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Ciamis: BPS Kabupaten Ciamis.
- Dharmasanti R, Ritohardoyo S. 2016. *Sarana Prasarana Permukiman Berdasarkan Sistem Perkotaan di*

- Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Bumi Indonesia*. 1–10.
- Dirlanudin, Sjafari A, Nugroho KS, Indriyany IA. 2018. Model pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sarana prasarana (Kasus di Desa Cikiruh Wetan dan Paniis Kabupaten Pandeglang). *Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 20-41. <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v2i1.4756>. Ir H Zulkifli Sjamsir, M. M. *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Massikki MN. 2005. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Permukiman. *MEKTEK*. 7(3): 148–157.
- Muljarjadi B. *Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah. MODUL 1: Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah 1.1*.
- Pratama BM. 2018. Analisis Hierarki Wilayah dan Interaksi Wilayah untuk Penentuan Pusat Pelayanan Wilayah Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur [Skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siska D. 2019. Hierarki Wilayah Berdasarkan Fasilitas Pelayanan di Kabupaten Banjar. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. 14(2): 125–131.
- Syahmat Z. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7(1): 44–61. <https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1327>.
- Tarigan R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utari ES. 2015. Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *Jurnal Economic and Policy*. 8(1): 1–88. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856>.
- Wijanarko P. 2013. Analisis Sektor Unggulan dan Kesenjangan Pembangunan dalam Wilayah Pengembangan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.